

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 1 HURUF A UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LARANGAN
MENAWARKAN DAN/ATAU MENGIKLANKAN BARANG SECARA
TIDAK BENAR SEOLAH BARANG TERSEBUT MEMILIKI POTONGAN
HARGA DI KOTA SINGARAJA**

Oleh

Komang Meru Awatara Putra Dinata, NIM 2014101174

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang menawarkan barang secara tidak benar seolah barang tersebut memiliki potongan harga. Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang seolah-olah dengan adanya potongan harga yakni berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 UUPK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Apabila penawaran barang yang seolah-olah disertakan potongan harga dilakukan dimedia elektronik maka berdasarkan Pasal 45a Ayat 1 UUTE pelaku usaha dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Secara Tidak Benar.

**IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 1 HURUF A UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT LARANGAN
MENAWARKAN DAN/ATAU MENGIKLANKAN BARANG SECARA
TIDAK BENAR SEOLAH BARANG TERSEBUT MEMILIKI POTONGAN
HARGA DI KOTA SINGARAJA**

By

Komang Meru Awatara Putra Dinata, NIM 2014101174

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the provisions of Article 9 Paragraph 1 Letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The type of research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The location of this research was conducted in Singaraja City. The data collection technique used was by means of document study, observation and interview. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the determination of the subjects used the Purposive Sampling technique. The data processing and analysis techniques were qualitative. The results of the study indicate that the provisions of Article 9 Paragraph 1 Letter a of the Consumer Protection Law have not been implemented properly. This is reflected in the fact that there are still business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The legal consequences for business actors who offer goods as if there is a discount, namely based on Article 62 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law, can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). If the offer of goods that appear to include a discount is made in electronic media, then based on Article 45a Paragraph 1 of the UIITE, the business actor can be sentenced to a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Implementation, Consumer Protection, Incorrectly.*